**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku membawa perubahan terhadap sistem, politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang menimbulkan beragam tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, Apalagi semenjak adanya perkembangan akuntansi sektor publik. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan dituntut agar mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang telah dibuat (Darise, 2008)

Dalam menyusun laporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya suatu standar yang diterapkan secara konsisten. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kemudian di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang isinya merupakan prinsip prinsip akuntansi dalam penyususnan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, suatu pemerintahan yang telah menerapkan SAP yang baik dan konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkulitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Suhardjo dan Adhi, 2013).

Laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian intern yang baik pula. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Karena laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecuaian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu, penerapan sistem pengendalian intern dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatakn efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara. Pemerintah kemudian meneribitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang standar pengendalian internal pemerintahan. Isu tentang SPI mendapat perhatian yang cukup besar belakangan ini dari BPK selaku auditor eksternal selalu menguji kekuatan SPI di setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan luas lingkup pengujian yang dilaksanakannya.

Selain SAP dan SPI, kualitas laporan pemerintah juga dipengaruhi tersedianya teknologi informasi yang diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan juga pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus disusun atau dihasilkan sesuai dengan SAP serta memiliki pengendalian yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPI. Selanjutnya di era globalisasi seperti saat ini hal yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi-organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi terutama dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. (Fajar, 2011).

Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun anggaran 2006 - 2018 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada tahun 2006 – 2007 LKPD kabupaten Banyuasin mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) , setahun kemudian tepatnya pada tahun 2008 opini BPK atas LKPD kabupaten Banyuasin mengalami penurunan yang sangat drastis yakni mendapat opini tidak memberikan pendapat. Mulai dari tahun 2009 pemerintah kabupaten Banyuasin mulai melakukan pembenahan dalam menyusun laporan keuangan dan hasil dari pembenahan itu ialah membaiknya opini audit atas LKPD kabupaten Banyuasin, ditahun 2009 LKPD kabupaten Banyuasin mendapat opini tidak wajar (TW), pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2010 opini audit atas LKPD kabupaten Banyuasin mendapat opini wajar dengan pengecualian, pada tahun 2011 LKPD kabupaten Banyuasin mendapat opini wajar tanpa pengecuaian dengan paragraf penjelas (WTP DPP). Pada tahun 2012 sampai 2018 pemerintah kabupaten Banyuasin mencetak prestasi yaitu mendapat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak lima kali berturut turut. Data hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan LKPD kabupaten Banyuasin**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun anggaran** | **Opini yang diperoleh dari BPK** |
| 2006 | Wajar dengan pengecualian (WDP) |
| 2007 | Wajar dengan pengecualian (WDP) |
| 2008 | Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) |
| 2009 | Tidak wajar (TW) |
| 2010 | Wajar dengan pengecualian (TDP) |
| 2011 | Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP) |
| 2012 | Wajar tanpa pengecualian (WTP) |
| 2013 | Wajar tanpa pengecualian (WTP) |
| 2014 | Wajar tanpa pengecualian (WTP) |
| 2015 | Wajar tanpa pengecualian (WTP) |
| 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2006-2018,

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terhadap LKPD kabupaten Banyuasin mengalami peningkatan semenjak tahun 2010 dan puncaknya pada tahun 2012 sampai 2018 LKPD kabupaten Banyuasin mendapat opini WTP, tentunya mendapat opini WTP selama 7 tahun berturut-turut merupakan suatu prestasi bagi kabupaten Banyuasin. Apalagi semenjak diterapkannya SAP pada tahun 2015 kualitas LKPD semakin meningkat. kemudian hal yang mebuat penulis tertarik untuk meneliti SPI adalah terdapat kasus di BPKAD Kabuaten Banyuasin dimana dua orang oknum pegawainya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada tahun 2015 terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana proyek Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin sebagaimana dilansir dalam situs Warta Berita. Dengan adanya kasus tersebut maka dapat diduga bahwa SPI yang dijalankan masih belum maksimal. sedangkan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dapat meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian seberapa besar pengaruh SAP, SPI dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin bisa mendapat opini WTP.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Komarudin (2014) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengndalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi untuk SAP sebesar 0,001 dan nilai signifikansi untuk SPI sebesar 0,015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan penelitian Rahman (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,023.

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar** **Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banyuasin”.**

**1.2 Perumusan Masalah**

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsisal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah penerapan standar akuntasi pemerintah, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

**1.3 Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada pegawai bagian Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2018

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
2. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
3. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 1 (satu) serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

1. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin.

1. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.